

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BERBASIS *ONLINE* DI KPP PRATAMA TABANAN

I Gede Putu Chrisyerio Ananda Pudja¹, I Ketut Winaya², Komang Adi Sastra Wijaya³

^{1 2 3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: canandapudja@gmail.com¹, ketutwinaya4@unud.ac.id², sastra_wijaya@unud.ac.id³

ABSTRACT

Tax submission is the obligation of individual taxpayers to directly and jointly finance the state and national development. One of the efforts of the Directorate General of Taxes in facilitating the submission of annual tax returns is by using the E-filing Program. The Pratama Tabanan Tax Service Office is one of the service offices that has used the E-Filing Program, but even though it has used this program, the number of taxpayers who submit their annual tax returns is still relatively low which does not reach 50% of the number of individual taxpayers registered with the Taxpayer Office. Primary Tax Service Office. This type of research is descriptive qualitative. The results showing that the submission of Taxpayer Tax Returns online is still not fully effective, it can be see from achieving goals and integrity which are experiencing obstacles in terms of funding and socialization, while for adaptation is quite effective.

Keywords : Effectiveness, E-Filing, Online Tax Return

1. PENDAHULUAN

Transformasi Birokrasi dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah proses pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang sudah dilaksanakan atau telah dijalankan oleh pemerintah dalam melakukan transformasi birokrasi adalah dengan sistem *E-Government*, dimana *E-Government* adalah pemanfaatan dari adanya teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada teknologi atau elektronik dengan memiliki manfaat pada penyederhanaan akses masyarakat ke semua informasi dan layanan yang dimiliki oleh negara sehingga dapat mempermudah proses pelaksanaan pelayanan publik..

Pengembangan *E-Government* pada pelayanan publik yang berbasis teknologi atau elektronik diterapkan dengan mengharapkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan tanpa memerlukan biaya yang besar serta mampu dijangkau oleh semua masyarakat di seluruh Indonesia tanpa adanya batasan yang disebabkan oleh sekat waktu ataupun biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Inpres RI No.3 Tahun 2003).

pengembangan *E-Government* tentu memerlukan dana yang cukup besar, dan tentunya dana itu berasal dari APBN, Pajak adalah tulangpunggung pendapatan dalam negeri dimana nantinya dana tersebut akan diperuntukan untuk membiayai negara. Pajak sendiri merupakan kontribusi yang bersifat wajib

kepada negara dengan status terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat mekasa berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan atau bayaran yang diterima secara langsung dan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi atau membiayai keperluan negara demi kemakmuran warga negara.

Penerapan *E-Government* yang telah dijalankan oleh pemerintah sebagai contohnya adalah pada bidang perpajakan, dimana pemerintah telah mengeluarkan sebuah program dengan *E-Filling* dimana program ini adalah suatu layanan atau program yang diperuntukan untuk WP melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan yang dapat dilakukan secara *online* oleh WP Orang Pribadi ataupun Badan ke Direktorat Jendral Pajak melalui *Application Service Prover*(ASP) dengan menggunakan teknologi informasi internet yang telah berkembang secara *online* dan *realtime*, yang dimana menyebabkan WP tidak diertukan lagi untuk membawa berkas dan meunggu untuk mendapatkan tanda termia secara manual (Wiyono, 2008). *E-filling* ini telah dilakukan secara serentak di seluruh KPP yang ada diseluruh Indonesia pada tahun 2014.

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan diartikan sebagai sikap dari seorang warga negara dalam memenuhi semua kewajiban-kewajiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggunakan haknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Restu, 2014). Berita tentang banyaknya kepatuhan WP yang rendah menjadi

hal yang penting untuk diperhatikan disebabkan tidak patuhnya warga negara dalam membayar pajak sehingga akan menimbulkan upaya untuk menghindari dan melakukan Tindakan serupa, tindakan tersebut secara tidak langsung akan akan menimbulkan efek berupa semakin menurunnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Jatuhnya tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak di Indonesia dipicu oleh terlalu besarnya jumlah warga negara yang tidak mempunyai NPWP dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) (Sadhini, 2012).

KPP Pratama Tabanan adalah salah satu Kantor Pelayanan yang telah menerapkan Program *E-Filling* ini dari tahun 2014 hingga sekarang dimana setelah Kantor Pelayanan Pratama Tabanan telah melaksanakan program tersebut Selama enam tahun meski jumlah dari WP Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar dan jumlah WP OP yang melaporkan SPTnya meningkat namun dari jumlah persen antara WP OP terdaftar dengan WP OP yang melaporkan kewajibannya selalu mengalami penurunan dan jumlah WP yang melakukan kewajibannya tidak pernah melebihi 50% dari jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas penyampaian surat pemberitahuan WP orang pribadi berbasis online di KPP pratama Tabanan. Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul “Analisis Efektivitas Penyampaian Surat Pemberitahuan WP Orang Pribadi Berbasis Online Di KPP Pratama Tabanan”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Efektivitas sebagai teori utama untuk dapat menggambarkan bagaimana efektivitas dari program penyampaian surat pemberitahuan WP orang pribadi berbasis online atau yang lebih dikenal dengan program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan. Untuk mengukur Efektivitas dari *e-filling* ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (2008) yang melihat suatu program itu efektif apabila telah memenuhi 3 aspek yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk dapat meraih suatu tujuan haruslah dianggap atau dilihat sebagai suatu proses yang telah dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan yang lebih terjamin atau lebih dipastikan maka diperlukan tahapan-tahapan atau rencana yang baik. Pencapaian tujuan ini sendiri dapat ditentukan berdasarkan dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit dan rencana kerja.

2. Integrasi

Integrasi yaitu mengukur suatu tingkat kemampuan yang dimiliki oleh organisasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut dengan organisasi lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan sosialisasi. Integrasi menyangkut tentang proses dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau individu untuk menyesuaikan keadaan dari organisasi atau program yang dilajankan dengan situasi yang terjadi atau lingkungannya. Adaptasi sendiri memiliki beberapa factor yang terdiri dari pembaharuan sumberdaya dan juga sarana dan prasarana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif ialah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data atau temuan dengan berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang (narasumber) dan perilaku yang diamati. Memperoleh informasi keadaan saat ini adalah tujuan dari penelitian ini. Setelah mendapatkan informasi, yang masih ada kaitannya dengan variabel-variabel yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini berlokasi pada KPP Pratama Tabanan. Pemilihan dari lokasi ini dikarenakan selama enam tahun terhitung dari tahun 2016 hingga 2021 jumlah dari WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan terus mengalami pertumbuhan namun jumlah WPOP yang melaporkan SPTnya nilainya fluktuatif sehingga hal ini mempengaruhi nilai persentase kepatuhannya. Jenis penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik yang menentukan informan berdasarkan dengan relevansi sumber informasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum KPP Pratama Tabanan

KPP Pratama Tabanan didirikan sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 KPP Pratama Tabanan merupakan pecahan dari KPP Pratama Denpasar Barat.

Pada mulanya Kantor Pelayanan Tabanan bertempat di Jalan Pulau Batam No.33X Tabanan dan pada tahun 2011 berpindah tempat digedung yang peralamatkan Jalan Gatot Subroto Sanggulan Kediri Tabanan, KPP Pratama Tabanan membawahi satu unit instansi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berlokasi di Jalan Mayor Sugiyar No. 11, Dauharu, Neraga Kabupaten Jembrana.

Gambaran Umum Program *E-Filling*

Sistem E-Filling mulai diterapkan dan diwajibkan untuk seluruh WP yang ada di negara Indonesia pada tahun 2014. Aturan yang mengatur tentang adanya sistem E-Filling adalah Per-03/PJ/2015 yang membahas terkait dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. Sistem E-Filling adalah sebuah layanan yang akan digunakan oleh WP di seluruh Indonesia untuk melakukan pengiriman ataupun penyampaian kewajiban dari WP yang disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem E-Filling ini akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dari WP secara elektronik baik untuk WP Orang Pribadi ataupun WP Badan ke Direktorat Jendral Pajak melalui Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan internet secara online dan realtime, sehingga dengan adanya sistem ini maka WP tidak perlu untuk melakukan percetakan berkas-berkas

ataupun formulir yang diperlukan, WP juga tidak perlu datang dan menunggu tanda terima secara manual.

Analisis Hasil Temuan

Penulis menganalisis hasil temuan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Ducas dalam Steers (1985), yaitu Indikator pencapaian tujuan, indikator integrasi, dan indikator adaptasi. Berikut penulis akan menjabarkan hasil temuan yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi literatur :

1. Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk mengukur kesesuaian tujuan program yang telah ditetapkan dengan hasil dari proses atau penerapan program yang terjadi dilapangan. Pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan melihat beberapa aspek seperti rencana kerja, kurun waktu dan juga pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit.

Pelaksanaan Program E-filling di KPP Pratama Tabanan sejalan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Adanya penerapan Program e-filling di KPP Pratama Tabanan memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi seluruh WP yang ada di Indonesia

dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan memberikan kemudahan melalui sistem internet yang bisa dilakukan secara online dan realtime.

Hasil observasi lapangan dan proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada para informan menemukan bahwa pencapaian tujuan pada program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan sejauh ini telah di dukung dengan adanya rencana kerja yang telah disiapkan. Pembiayaan bersumber melalui APBN yang diturunkan oleh pusat dan dana ini berada di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN), untuk menjalankan sistem *e-filling* ini setiap KPP tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan sistem *e-filling*. Namun dalam pendanaan ini terjadi kendala yaitu kurangnya dana yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan untuk melakukan sosialisasi yang dilakukan secara langsung sehingga sosialisasi seringkali dilakukan secara online untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan dalam proses sosialisasi yang nantinya akan dilakukan. Kendala lainnya adalah keikutsertaan dari sasaran, dimana sasaran yang dimaksud adalah WP yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Peningkatan jumlah WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan dari jumlah WP terdaftar, dimana jumlah WP yang melakukan penyampaian surat pemberitahuan tahunan tidak lebih dari 50%

jumlah dari WP Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

2. Integrasi

Integrasi mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati, mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain yang terkait dengan program tersebut. Integrasi berkaitan dengan beberapa aspek yaitu proses sosialisasi, prosedur, dan sistem pengawasan atau pemantauan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan saat ini telah dilakukan dengan berbagai cara dengan memanfaatkan berbagai social media untuk mengedukasi WP agar meningkatkan pengetahuan tentang pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari WP. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi, tingkat kepatuhan WP tetap berada di bawah 50%, selain itu, jumlah dari WP yang mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Tabanan secara online yang dilakukan dengan menggunakan Whatsapp Grup hanya terdiri dari 45 orang yang berada di dalam grup tersebut sudah termasuk dengan petugas yang bertugas.

Terkait dengan prosedur dan juga pengawasan atau pemantauan telah dilakukan dengan baik, untuk prosedur yang telah dijalankan sudah diringkas secara singkat dan mudah untuk di mengerti oleh WP dan juga sudah

disediakan petunjuk bantuan di dalam website DJPonline saat melakukan penyampaian SPT tahunan.

Pengawasan dan pemantauan dari program *e-filling* ini telah dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan yang bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) dimana dengan sistem ini KPP Pratama Tabanan dapat memantau atau melihat jumlah WP yang telah melakukan penyampaian dan juga dapat melihat siapa saja yang belum melakukan penyampaian SPT sehingga KPP Pratama Tabanan dapat memberikan teguran atau sanksi bagi yang tidak melakukan penyampaian SPT Tahunan dengan tepat waktu.

3. Adaptasi

Adaptasi menyangkut tentang kemampuan organisasi atau program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya atau situasi yang terjadi agar mampu mempertahankan pelaksanaan kegiatan pada program tersebut dan juga untuk mendapatkan tujuan yang telah ditentukan. Penilaian dalam adaptasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek pengadaan sarana dan prasarana, selain itu dapat dilihat juga dari aspek pengisian tenaga kerja dalam pelaksanaan suatu program.

Sarana dan prasarana yang telah tersedia di KPP Pratama Tabanan sudah sangat baik mengingat tidak adanya sarana dan prasarana yang diskhususkan hanya

untuk program ini, sehingga sarana dan prasarana yang digunakan memang inventaris dari KPP Pratama Tabanan sehingga kualitas dan juga kuantitas dari sarana dan prasarana tersebut sudah terjamin.

Pengisian tenaga kerja di KPP Pratama Tabanan tidak ada perekrutan yang dikhususkan untuk menjadi petugas dari program *e-filling* ini. KPP Pratama Tabanan merasa kekurangan petugas saat mendekati dari bulan Pajak, atau bulan pelaporan pajak. Namun untuk mengatasi hal tersebut KPP Pratama memiliki sebuah program untuk mendukung hal tersebut yang disebut dengan relawan pajak, dimana relawan pajak ini adalah mahasiswa/i di universitas seluruh Bali yang diajak bekerjasama untuk membantu WP yang mengalami kendala dalam melakukan pelaporan dengan menggunakan program *e-filling*. Relawan pajak ini akan ditempatkan di Posko Pembantu yang terletak di parkir belakang KPP Pratama Tabanan. Diharapkan dengan adanya relawan pajak ini dapat mempermudah dan juga mengisi kekosongan yang terdapat di KPP Pratama Tabanan saat mendekati bulan pelaporan SPT tahunan setiap tahunnya. Relawan pajak ini memang telah rutin dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan guna untuk mendukung kegiatan pelayanan yang terjadi dikantor tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan tersebut.

Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Online

Penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan kepada KPP Pratama Tabanan sebagai pihak yang melaksanakan atau menjalankan Program *E-filling* tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan harus didukung dengan adanya anggaran biaya operasional yang memadai dari Direktorat Jendral Pajak Pusat agar kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan dapat berjalan dengan optimal sehingga kegiatan yang dilakukan dapat mendapatkan manfaat yang diharapkan.
2. Pengadaan sosialisasi terkait dengan *e-filling* kepada WP harus tetap dilakukan dengan menghususkan kepada WP secara langsung dan menargetkan usia yang mengikuti sosialisasi dan dapat dilakukan menjelang bulan penyampaian SPT Tahunan dan dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan jelas agar WP dapat mengerti dan dapat menggunakan program *e-filling* dengan baik. Dan lebih baik untuk melakukan pelatihan atau menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan program *e-filling* ini secara langsung dari pad dilakukan secara online.
3. Adanya pembentukan kader-kader di setiap desa untuk membantu sosialisasi terkait dengan Program *e-filling* ke masing-masing

desa dengan harapan hal tersebut dapat mengurangi dan menekan pengeluaran biaya operasional.

4. Penambahan tugas dari Relawan Pajak dimana tugas yang ditambahkan yaitu membantu KPP untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada WP terkait dengan pentingnya penyampaian Surat Pemberitahuan, dan juga menjelaskan kepada WP bagaimana penyampaian menggunakan program *e-filling* agar WP yang belum mengerti dapat menyampaikan SPT nya dengan menggunakan program tersebut agar lebih mempermudah WP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilaksanakan dalam penelitian terkait Analisis Efektivitas Penyampaian Surat Pemberitahuan WP Orang Pribadi Berbasis Online di KPP Pratama Tabanan yang bertujuan untuk mempermudah WP dalam menyampaikan SPT Tahunannya dan untuk meningkatkan jumlah WP yang memenuhi kewajibannya melalui pengukuran efektivitas Duncan dalam Steers (1985) dengan beberapa indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan, belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator pencapaian tujuan yang belum optimal karena masih terdapat kendala dari segi anggaran operasional yang masih terbatas, dan pada indikator integritas belum dapat dikatakan optimal jika dilihat dari segi pengadaan sosialisasinya. Sedangkan untuk

indikator adaptasi sudah cukup optimal dilihat dari pengadaan sarana dan prasarananya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan melihat dari beberapa permasalahan yang terjadi dan juga faktor penghambat yang ditemukan pada pelaksanaan Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan, maka penulis memberikan beberapa saran agar dalam pelaksanaan kedepannya dapat sepenuhnya berjalan efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan harus didukung dengan adanya anggaran biaya operasional yang memadai dari Direktorat Jendral Pajak Pusat agar dapat mendukung pelaksanaan Program *e-filling* di KPP Pratama Tabanan.
2. Pengadaan sosialisasi terkait dengan *e-filling* kepada WP dengan menghususkan kepada WP secara langsung dan menargetkan usia serta untuk sosialisasi dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan jelas.
3. Dibentuknya kader – kader di setiap desa untuk membantu sosialisasi terkait program *e-filling* ke masing – masing desa dengan harapan hal tersebut dapat mengurangi dan menekan pengeluaran biaya operasional.
4. Pemberian penjelasan sanksi kepada WP jika tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.

Daftar Pustaka

Buku :

Agustino, Leo. (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Gava Media.

Bohari. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta; PT Rajagrafindo Persada

Brotodiharjo, R, Santoso. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.

Fidel. (2010). *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*. Jakarta : Murai Kencana.

Ilyas, Wirawan B.(2013). *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Selemba Empat

Indrajit, R.E.(2005). *E-Government in Action*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta; Andi

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta; Graha Ilmu

Rahayu Siti Kurnia, Ely Sahayati. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan, Edisi Pertama*. Yogyakarta; Graha Ilmu

Rahman Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung; Nuansa

Rosdania, Irianto. (2011). *Panduan Pelengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta; Visimedia Pustaka

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta

Young, James S.L. (2003). *E-Gverment in Asia; Enabling Public Service Innovation in The 21.Century* Singapore; Times Media

Jurnal :

Mukesh Kumar. (2014). *E-Filling : Creative New Revolution in Taxation of India. Journal.*
Departement Administrasi Bisnis.
Universitas Lucknow, India

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016).
Pengaruh Kesadaran WP Dan
Pengetahuan Perpajakan WP Terhadap
Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak
Penghasilan. *Journal Of Accounting.*

Peraturan :

Intruksi Presiden Republik Indonesia No.6
Tahun 2001 tentang Telematika

Intruksi Presiden Republik Indonesia No.3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan *E-
Government*

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2000 tentang
Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Per-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat
Pemberitahuan Elektronik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan

Undang - Undang No. 28 Tahun 2007